

PERAN DINAS PARIWISATA DALAM PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA KOTA BITUNG

Nowzellita Makahinda
Daicy Lengkong
Deysi Tampongangoy

Abstract : Vision and Mission of the realization of Bitung Bitung City as an international port city, industry, trade, services and tourism environmentally sound and superior in the era of globalization. Furthermore, the mission outlined in Bitung City Government namely Panca Bina where one of them is the Human Development. One program in Human Development's mission is determined Bitung City Government and seeks to prepare people qualified and highly skilled so that they can compete in the era of globalization while preserving the ethical values, moral and religious norms. But until now the Government's attention to the development of the tourism industry Bitung is still very minimal. Less successful development of tourism in the city of Bitung not be separated from the implementation of policies that are still using the top-down approach is the approach of the party from top to bottom. In the process of implementation of the government's role is very big, in this approach is the assumption that occurs decision makers is a key actor in the success of implementation, while the other parties involved in the implementation process hampered, so that the decision makers underestimate the strategic initiatives coming from the level of bureaucracy Low and subsystems wisdom another. And the non-involvement of the public in policy making from planning, organizing, implementation and supervision. This research uses qualitative research is research that is used to examine the Role of the Government in which the researcher is a key instrument. While data collection techniques used by researchers is a method that is based on the Interview Interview Guide (interview guide), documentation and observation. Researchers carrying out research in the Department of Tourism and Culture City of Bitung by using the techniques of data collection guidelines the Department of Tourism.

Based on the results of the study: The role of the department of tourism is very important for the development of tourism industry strongly support the economy of the town Bitung. And to attract tourists and the investor engaged in tourism. The role of the tourism department is very influential on the development of the tourism industry in the city of Bitung. Role of department of tourism is very important because tourism agencies provide recommendations and input for monitoring the development of the tourism industry. Suggestions for Bitung City Tourism Office is a need for dissemination to the public of the importance of tourism development. The government should be more active in implementing tourism development, both in terms of promoting the attraction - attraction to the local level and also to the level of long-distance, in order to make it more widely known by the public tourist or foreign countries about tourism in the city of Bitung. Expected also for the tourism department of government even Bitung for mutual coordination even coordinated with the central government related to the development of tourism, in order to resolve the problems or obstacles in the development of tourism.

Keyword: Role of the Department, Tourism

PENDAHULUAN

Pariwisata pada saat ini merupakan suatu kebutuhan mutlak manusia, baik yang melakukan perjalanan wisata maupun masyarakat sekitar daerah tujuan wisata. Wisatawan butuh dipenuhi keinginannya, sementara masyarakat sekitar lokasi berharap akan mendapatkan implikasi positif berupa peningkatan pendapatan dan kesejahteraan. Fenomena ini harus menjadi perhatian para pembantu kebijakan sebagaimana diamanatkan bahwa pembangunan kepariwisataan nasional diarahkan menjadi sektor andalan dan unggulan secara luas akan diterjemahkan sebagai penghasilan devisa terbesar yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan daerah, memberdayakan perekonomian masyarakat,

memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha. Undang Undang No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata, yang dimaksud dengan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pengembangan sektor pariwisata yang dilakukan dengan baik dan maksimal akan mampu menarik wisatawan domestik maupun wisatawan asing untuk datang dan membelanjakan uangnya dalam kegiatan berwisatanya. Dari transaksi itulah masyarakat daerah wisata akan terangkat taraf hidupnya serta negara akan mendapat devisa dari wisatawan asing yang menukar mata uang negaranya dengan rupiah. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang

Kepariwisata dapat diketahui bahwa pariwisata bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa, mempererat persahabatan antar bangsa.

Kota Bitung merupakan kota multi dimensi dengan keragaman etnis yang dalam kesehariannya berkembang dalam nuansa kebersamaan dengan menghargai keragaman tersebut dengan didukung semangat dan budaya Mapalus. Kelurahan yang ada masih ada yang mempunyai ciri pedesaan baik dilihat dari segi fisik maupun pola hidup masyarakatnya. Masih ada beberapa kelurahan yang bercirikan kelurahan pesisir (Bitung Selatan, Bitung Timur dan beberapa kelurahan di Bitung Utara) maupun kelurahan yang bercirikan masyarakat petani (Bitung Utara). Keberhasilan pembangunan Kota Bitung yang dicerminkan dari laju pertumbuhan ekonomi cukup menggembirakan, telah menjadi daya tarik tersendiri bagi para migran untuk tinggal dan bekerja di Kota Bitung.

Menyadari heterogenitas penduduk dengan berbagai latar belakang budaya maka pembangunan Kota Bitung diarahkan pada Terwujudnya Kota Bitung sebagai kota pelabuhan Internasional, Industri, Pariwisata, Perdagangan dan Jasa yang berwawasan lingkungan dan unggul di era globalisasi sesuai dengan visi yang akan dicapai oleh pemerintah dan masyarakat Kota Bitung. Berbagai tantangan, potensi dan dinamika lingkungan strategis yang mempengaruhi perkembangan pembangunan Kota Bitung merupakan motivasi bagi pemerintah dan masyarakat serta semua *stake holders* pembangunan untuk merancang dan

melaksanakan pembangunan dengan mengarahkan pada skala prioritas yang dapat menggerakkan roda perekonomian rakyat dan menjamin kelangsungan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Disamping itu kemajuan teknologi informasi dan efek globalisasi telah menciptakan persaingan antar kekuatan ekonomi semakin meningkat, menuntut proses pembangunan yang semakin efisien serta menghasilkan produk dengan daya saing yang semakin menjadi tantangan pembangunan kedepan. Beberapa program prioritas pembangunan pada era otonomi daerah telah memberi peluang bagi daerah untuk mengelola sumber daya yang ada secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat dengan mengutamakan berbagai isu publik dalam pelaksanaan pembangunan.

Visi dan Misi Kota Bitung yakni Terwujudnya Bitung sebagai kota pelabuhan internasional, industri, perdagangan, jasa dan pariwisata yang berwawasan lingkungan dan unggul di era globalisasi. Selanjutnya dijabarkan dalam misi Pemerintah Kota Bitung yakni Panca Bina dimana salah satunya adalah Bina Manusia. Salah satu program dalam Misi Bina Manusia adalah Pemerintah Kota Bitung bertekad dan berupaya untuk menyiapkan masyarakat yang berkualitas dan berkemampuan tinggi sehingga mampu bersaing di era globalisasi dengan tetap menjaga kelestarian nilai-nilai etika, moral serta norma agama.

Sebagai industri yang prospektif, maka upaya mengembangkan pariwisata untuk mendorong kemajuan ekonomi bangsa dilakukan berbagai Negara, tak terkecuali Indonesia. Program pengembangan pariwisata menjadi salah satu program pembangunan nasional di Indonesia yang secara terus menerus menjadi perhatian pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta

menjadi salah satu andalan Pemerintah dalam memulihkan dari kondisi krisis bangsa.

Pada saat ini, kedudukan sektor pariwisata menjadi salah satu sektor andalan yang dapat meningkatkan devisa negara sebagai pendukung komoditi ekspor migas maupun non migas. Pengembangan sektor pariwisata dilakukan karena mampu memberikan kontribusi yang cukup besar bagi penerimaan devisa negara dan disamping itu kegiatan pariwisata merupakan hal yang terkait erat dengan sumberdaya yang unik dari suatu tujuan wisata yaitu dalam bentuk daya tarik alam dan daya tarik budaya.

Namun sampai saat ini perhatian Pemerintah terhadap pembangunan pariwisata khas Kota Bitung dinilai masih sangat minim. Kurang berhasilnya pembangunan pariwisata di Kota Bitung tidak lepas dari penerapan kebijakan yang masih menggunakan pendekatan *top down* yaitu pendekatan secara satu pihak dari atas ke bawah. Dalam proses implementasi peranan pemerintah sangat besar, pada pendekatan ini asumsi yang terjadi adalah para pembuat keputusan merupakan aktor kunci dalam keberhasilan implementasi, sedangkan pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses implementasi dianggap menghambat, sehingga para pembuat keputusan meremehkan inisiatif strategi yang berasal dari level birokrasi rendah maupun subsistem-subsistem kebijaksanaan yang lain. Dan tidak dilibatkannya masyarakat dalam penyusunan kebijakan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.

METODE PENELITIAN

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi

(gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Disebut sebagai metode kualitatif karena hanya ada satu variabel dan data yang terkumpul analisisnya bersifat kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, data dituangkan secara deskriptif dalam bentuk laporan dan uraian (Nasution, 2001). Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendapatkan dan menyampaikan fakta-fakta dengan jelas dan teliti (Sugiyono, 2008).

b. Fokus Penelitian

Sebagaimana telah disebutkan pada bagian pendahuluan di atas bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui “Peran dinas Pariwisata dan Budaya dalam Pembangunan industri pariwisata kota bitung”.

c. Sumber data dan informan

Salah satu sifat penelitian kualitatif adalah tidak terlalu mementingkan jumlah sumber data atau informan, tetapi lebih mementingkan isi (content), relevansi, sumber/informan yang benar-benar dapat memberikan informasi baik mengenai orang, peristiwa atau hal. Oleh karena itu teknik yang tepat untuk menentukan sumber data/informan adalah “*purposive sampling*” yaitu penentuan sumber data berdasarkan tujuan tertentu (Sugiono, 2009). Yang menjadi informan maupun sumber data dalam penelitian ini adalah: Kepala Dinas Pariwisata Dan Budaya, dan kepala - kepala lingkungan yang masuk dalam lokasi obyek wisata yang akan di kembangkan atau dipromosi.

d. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dalam penelitian kualitatif penelitian merupakan instrumen utama. Atas pertimbangan inilah maka

dalam pengumpulan data pada penelitian ini digunakan teknik sebagai berikut :

1. Wawancara (interview). Wawancara dilakukan pada informasi yang telah ditentukan untuk mendapatkan data dan informasi yang jelas dan akurat tentang berbagai hal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam wawancara ini digunakan pedoman wawancara sebagai paduan wawancara agar dapat lebih terfokus dan konsistensi hasil pendataan.
2. Studi dokumentasi. Studi dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder pendukung data primer hasil wawancara. Data sekunder dikumpulkan dari dokumen-dokumen yang telah tersedia di kantor pariwisata dan budaya.

e. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Menurut Bogdan dan Biklen (dalam Moleong, 2006), bahwa analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah data menjadi satuan-satuan yang dapat dikelola, mensistesisikan data, mencari dan menemukan pola-pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Sedangkan menurut Seidel (dalam Moleong, 2006), analisis data kualitatif prosesnya terdiri dari : mencatat dan menghasilkan catatan lapangan; mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensistesisikan, membuat ikhtisar dan membuat indeksnya; berpikir dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menentukan pola dan hubungan-hubungan dan membuat temuan-temuan umum.

Pengumpulan data. Dalam penelitian ini pengumpulan data primer yang dianalisis adalah menggunakan teknik wawancara (interview) berpedoman pada pernyataan-pernyataan (pedoman wawancara) yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.

Reduksi data, ialah proses pemilihan, pemutusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Kegiatan mereduksi data ini dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung.

Penyajian data, data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk teks naratif guna mempermudah pemahaman, penafsiran data dan penarikan kesimpulan.

Penarikan kesimpulan atau verifikasi, ialah merupakan langkah terakhir dari analisis kualitatif yaitu membuat atas hasil analisis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang No. 22 tahun 1999 telah di revisi menjadi UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa penyelenggaraan otonomi daerah dilakukan atas dasar peran serta masyarakat, prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Implikasinya adalah pentingnya rekonseptualisasi sistem perencanaan pembangunan dalam konteks arus pergeseran peran pusat ke daerah dalam sistem dan mekanisme pengelolaan pembangunan. Wigyo Adiyoso, (2009:61)

Secara yuridis, peraturan daerah termasuk dalam tata urutan perundang-undangan paling bawah dan hal itu merupakan refleksi dari kebijakan daerah yang mencerminkan kekuasaan dan sekaligus kewenangan dari pemerintah daerah. Dengan pemerintah daerah memiliki

keleluasaan sebagai sumber kewenangannya tersebut untuk secara bebas mengatur dan mengurus segala macam urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan batas kewengannya yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat dan diterima oleh pemerintah daerah UU No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan, Suriansyah murhani (2008 : 9).

Secara umum, peran pemerintah daerah dalam pembangunan pariwisata merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari kewenangan dan urusan yang melekat sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Pasal 14 ayat (1) huruf (a) Perencanaan dan pengendalian pembangunan. (i) fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah. (j) dalam hal pengendalian dan pelestarian lingkungan hidup, terutama dalam hubungannya dengan konsep pengembangan pariwisata pada hakekatnya melestarikan dan memanfaatkan alam dan budaya masyarakat, Sentosa Sembiring (2009 : 10).

Ayat 2 urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan “urusan pemerintahan yang secara nyata ada” dalam ketentuan ini sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi yang dimiliki antara lain pertambangan, perikanan, pertanian, perkebunan, kehutanan, dan pariwisata, Sarman, dan Mohammad Taufik Makarao (2011 :70).

Undang-Undang 32 Tahun 2004 pasal 21 menentukan bahwa, dalam menyelenggarakan ekonomi daerah mempunyai hak untuk mendapatkan sumber - sumber pendapatan lain

yang sah, Dalam hal ini melalui pariwisata. Untuk itu pemerintah daerah berperan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, menyediakan fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak, mengembangkan sumber produktif di daerah, melestarikan lingkungan hidup, melestarikan nilai sosial budaya demi pengembangan pariwisata di Kota Bitung

Pasal 22 Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang merupakan urusan pilihan diatur dalam PP 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan antara pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Pasal 7 ayat 4 huruf (e) terutama di bidang pariwisata.

Sektor pariwisata mempertemukan dua atau lebih budaya yang berbeda. Wisatawan memperoleh pengalaman dari budaya lokal, sementara penduduk lokal memainkan proses edukasi perihal lingkungan spesifik lokal dan mendapatkan penghasilan. Sinergi tersebut harus dapat dipelihara dengan dukungan kebijakan pemerintah yang kondusif bagi beroperasinya sektor swasta dan bantuan dari kelompok masyarakat nirlaba. Oleh karena itu, penduduk lokal harus ramah, terbuka, toleransi, dan memiliki motivasi tinggi untuk belajar memahami karakter wisatawan khususnya dari mancan Negara. Iwan Nugroho, (2011:241)

Pembangunan dan pembinaan hukum Indonesia didasarkan pada pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan dan pembinaan hukum diarahkan agar dapat :

- Memantapkan hasil pembangunan yang telah dicapai.
- Menciptakan kondisi yang lebih mantap, sehingga setiap anggota masyarakat dapat menikmati suasana serta iklim ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan sosial.

- Lebih memberi dukungan dan pengamanan untuk mencapai kemakmuran, (Mulyana W. Kusumah 1986 :43).

Kegiatan pariwisata tidak terlepas dari peran serta pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemerintah bertanggung jawab atas empat hal utama yaitu :

1. perencanaan (*planning*) daerah atau kawasan pariwisata.
2. pembangunan (*development*) fasilitas utama dan pendukung pariwisata.
3. pengeluaran kebijakan (*policy*) pariwisata, dan pembuatan dan penegakan peraturan (*regulation*).

Menurut, **Astra M. Ligouw, SH, M.Si** (golongan penata tkt I. III d, masa kerja 15 tahun, jabatan Kasi. Pengembangan Pasar dan Informasi pariwisata) Yaitu;

1. Bekerja sama dengan instansi yang terkait.
2. Melakukan monitoring atau pengawasan terhadap wilayah destinasi pariwisata beserta industri pariwisata yang ada di Kota Bitung.
3. Adanya informasi pariwisata dan data promosi pariwisata.

Olga O. Somba, SE (golongan III c, masa kerja 12 Tahun, jabatan Kasie. Desain dan Arsitektur) juga menambahkan mengenai peran dari dinas pariwisata Yaitu :

“Sangat penting karena pembangunan industri pariwisata sangat menunjang perekonomian kota bitung. Dan untuk menarik kunjungan wisatawan dan para investor yang bergerak di bidang pariwisata”.

Menurut Kevin Kambey, S.Sos, (golongan penata muda tkt I. III b, masa kerja 5 tahun, jabatan Kasie. Pengembangan Industri Perfilman) Bahwa :

“peran dinas pariwisata sangat berpengaruh atas pembangunan industri pariwisata yang ada

di Kota Bitung. Oleh karena tugas pokok dan fungsi melekat di dinas pariwisata”.

Menurut **Ikke**, *“dinas pariwisata sangat mendukung setiap stakeholder pariwisata yang ada Kota Bitung. Sebab dengan hanya membangun kerja sama yang baik dengan stakeholder pariwisata maka industri pariwisata dapat berjalan dengan baik dan pembangunan dapat berjalan dengan merata”.*

Sedangkan menurut Yolanda Singal, SP, M.Si (golongan kepangkatan III d, masa kerja PNS 12 Tahun, jabatan Kasi) bahwa:

“Peran dinas pariwisata sangat penting karena dinas pariwisata memberikan rekomendasi dan masukan untuk pengawasan pembangunan industri pariwisata”.

Sedangkan Menurut : **Edward Monangin, S.IK** (golongan kepangkatan III d, masa kerja 13 Tahun, jabatan Kasi. Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata) dan **Joice Natarang, SS, M.Pd** (golongan III b, masa kerja 7 tahun, jabatan Kasi. Industri Pariwisata) memberikan tanggapan yang sama terkait dengan peran dari dinas Pariwisata Kota Bitung. Bahwa

“Peran Dinas Pariwisata sampai sejauh ini Dispar (Dinas Pariwisata) memiliki peran yang belum terlalu terlibat jauh karena pengurusan ijin / rekomendasi usaha industri pariwisata bersifat 1 (satu) pintu diperijinan. Dispar (dinas pariwisata) hanya memiliki wewenang untuk mengatasi / mengevaluasi industri pariwisata yang telah ada”.

Berikut ini adalah penjelasan mengenai peran - peran pemerintah dalam bidang pariwisata tersebut di atas: Subadra, I Nengah (2006 : 16)

a. Perencanaan (*planning*) pariwisata

Pariwisata merupakan industri yang memiliki kriteria - kriteria khusus, mengakibatkan dampak positif dan negatif. Untuk memenuhi kriteria khusus tersebut, memaksimalkan dampak positif

dan meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan sehubungan dengan pengembangan pariwisata, diperlukan perencanaan pariwisata yang matang. Kesalahan dalam perencanaan akan mengakibatkan munculnya berbagai macam permasalahan dan konflik kepentingan di antara para stakeholders. Masing - masing daerah tujuan wisata memiliki permasalahan yang berbeda dan memerlukan jalan keluar yang berbeda pula. Dalam pariwisata, perencanaan bertujuan untuk mencapai cita-cita atau tujuan pengembangan pariwisata. Secara garis besar perencanaan pariwisata mencakup beberapa hal penting yaitu:

- 1) Perencanaan pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk memacu pertumbuhan berbagai jenis industri yang berkaitan dengan pariwisata,
- 2) Perencanaan penggunaan lahan,
- 3) Perencanaan infrastruktur yang berhubungan dengan jalan, bandar udara, dan keperluan lainnya seperti; listrik, air, pembuangan sampah dan lain-lain,
- 4) Perencanaan pelayanan sosial yang berhubungan dengan penyediaan lapangan pekerjaan, pelayanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial, dan
- 5) Perencanaan keamanan yang mencakup keamanan internal untuk daerah tujuan wisata dan para wisatawan.

b. Pembangunan pariwisata

Pembangunan pariwisata umumnya dilakukan oleh sektor swasta terutama pembangunan fasilitas dan jasa pariwisata. Namun, pengadaan infrastruktur umum seperti jalan, listrik dan air yang berhubungan dengan pengembangan pariwisata terutama untuk proyek - proyek yang berskala besar yang memerlukan dana yang sangat besar seperti pembangunan bandar udara, jalan untuk transportasi darat, proyek penyediaan air

bersih, dan proyek pembuangan limbah merupakan tanggung jawab pemerintah. Selain itu, pemerintah juga berperan sebagai penjamin dan pengawas para investor yang menanamkan modalnya dalam bidang pembangunan pariwisata.

Menurut **Astra M. Ligow, SH, M.Si**, proses dalam melaksanakan pembangunan industri pariwisata khususnya bagi para investor adalah sebagai berikut:

1. *Investor melakukan survey lokasi untuk pembangunan industri pariwisata.*
2. *Investor melakukan atau menghubungi instansi yang terkait.*
3. *Investor melengkapi berkas – berkas yang harus disediakan.*

Menurut **Olga O. Somba, SE** menambahkan bahwa:

“faktor – faktor hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan pembangunan pariwisata adalah; kurangnya investor, kurangnya ketrampilan penunjang pengembangan pariwisata, dan tidak memiliki dana, kesadaran masyarakat”.

Yang menjadi permasalahan lain menurut **Astra M. Ligow, SH, M.Si** adalah: *“Berkas – berkas yang disiapkan oleh investor tidak lengkap, dan tidak adanya komunikasi yang lebih baik”.*

c. Kebijakan Pariwisata

Kebijakan merupakan perencanaan jangka panjang yang mencakup tujuan pembangunan pariwisata dan cara atau prosedur pencapaian tujuan tersebut yang dibuat dalam pernyataan - pernyataan formal seperti hukum dan dokumen - dokumen resmi lainnya. Kebijakan yang dibuat pemerintah harus sepenuhnya dijadikan panduan dan ditaati oleh para stakeholders. Kebijakan - kebijakan yang harus dibuat dalam pariwisata adalah kebijakan yang berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi, peningkatan

kesempatan kerja, dan hubungan politik terutama politik luar negeri bagi daerah tujuan wisata yang mengandalkan wisatawan manca negara.

Umumnya kebijakan pariwisata di masukkan ke dalam kebijakan ekonomi secara keseluruhan yang kebijakannya mencakup struktur dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Kebijakan ekonomi yang harus dibuat sehubungan dengan pembangunan pariwisata adalah kebijakan mengenai ketenagakerjaan, penanaman modal dan keuangan, industri - industri penting untuk mendukung kegiatan pariwisata, dan perdagangan barang dan jasa. Kita harus melihat fungsi hukum sebagai suatu alat atau sarana penting untuk menunjang kelangsungan pembangunan. Disini hukum dalam fungsinya sebagai “a toll of social engineering” bukan saja untuk dijadikan landasan bagi program pembangunan dalam artian bahwa keseluruhan proses pembangunan itu harus dilaksanakan di atas rel nya hukum, akan tetapi juga dari ketentuan - ketentuan hukum akan diharapkan beberapa in-put dalam mempercepat proses pembangunan itu sendiri, Abdurrahman, (1979 : 12).

Menurut **Kevin Kambey, S.Sos** bahwa: straregi yang diperlukan untuk menghadapi permasalahan dalam pembangunan industri pariwisata Kota Bitung adalah;

“Aturan atau regulasi yang jelas, serta administrasi jangan dipersulit, dan Pengembangan atau renovasi akan tempat / objek wisata yang belum terjamah dengan baik”.

d. Peraturan pariwisata

Peraturan pemerintah memiliki peran yang sangat penting terutama dalam melindungi wisatawan dan memperkaya atau

mempertinggi pengalaman perjalanannya. Peraturan - peraturan penting yang harus dibuat oleh pemerintah untuk kepentingan tersebut ialah:

1. Peraturan perlindungan wisatawan terutama bagi biro perjalanan wisata yang mengharuskan wisatawan untuk membayar uang muka (deposit payment) sebagai jaminan pemesanan jasa seperti akomodasi, tour dan lain-lain,
2. Peraturan keamanan kebakaran yang mencakup pengaturan mengenai jumlah minimal lampu yang ada di masing-masing lantai hotel dan alat-alat pendukung keselamatan lainnya,
3. Peraturan keamanan makanan dan kesehatan yang mengatur mengenai standar kesehatan makanan yang disuguhkan kepada wisatawan,
4. Peraturan standar kompetensi pekerja-pekerja yang membutuhkan pengetahuan dan keahlian khusus seperti seperti pilot, sopir, dan nahkoda.

Selain itu, pemerintah juga bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya alam seperti; flora dan fauna yang langka, air, tanah dan udara agar tidak terjadi pencemaran yang dapat mengganggu bahkan merusak suatu ekosistem. Oleh karena itu, penerapan semua peraturan pemerintah dan undang - undang yang berlaku mutlak dilaksanakan oleh pemerintah.

Peran pemerintah dalam pariwisata juga telah dikemukakan oleh Wahab. S (2008:112):

a. Peran Pemerintah dalam Ekonomi Pariwisata

Pengembangan pariwisata harus merupakan pengembangan yang berencana secara menyeluruh, sehingga dapat diperoleh manfaat yang optimal bagi masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial dan cultural. Perencanaan tersebut harus mengintegrasikan pengembangan pariwisata kedalam suatu program pembangunan

ekonomi, fisik, dan sosial dari suatu negara. Di samping itu, rencana tersebut harus mampu memberikan kerangka kerja kebijakan pemerintah, untuk mendorong dan mengendalikan pengembangan pariwisata. Peranan pemerintah dalam mengembangkan pariwisata dalam garis besarnya ialah menyediakan infrastruktur (tidak hanya dalam bentuk fisik), memperluas berbagai bentuk fasilitas, kegiatan koordinasi antara aparatur pemerintah dengan pihak swasta, pengaturan dan promosi umum ke luar negeri.

Ikke (staf pegawai di dinas pariwisata Kota Bitung) juga menyampaikan hal yang sama, yaitu: tahap – tahap dalam melaksanakan pembangunan industri yaitu: *“Melihat setiap investor yang akan datang ke Kota Bitung, Menyerahkan lahan bagi industri pariwisata, Memberikan promosi pariwisata Kota Bitung baik dalam Negeri maupun luar Negeri, Menyediakan sumber daya manusia yang handal dan Memiliki standar inti dalam mengembangkan pembangunan pariwisata”*.

Tidak dapat dipungkiri bahwa hampir diseluruh daerah Indonesia terdapat potensi pariwisata, maka yang perlu diperhatikan adalah sarana transportasi, keadaan infrastruktur dan sarana-sarana pariwisata. Pemerintah dalam pariwisata digambarkan sebagai berikut :

- Regulasi, (Lisensi, perencanaan, klasifikasi system, pengupahan)
- Penerimaan (pajak, retribusi)
- Pengeluaran (Infrastruktur, investasi, bantuan, pinjaman)
- Redistribusi (pajak, kesejahteraan, pelatihan)
- Ekonomi (pemasok konsumen)

b. Pajak dalam pariwisata

Banyak pemerintah memanfaatkan pariwisata sebagai :

- Sumber pendapatan
- Sumber biaya bagi sektor lain.

Tetapi di beberapa negara pariwisata masih tidak menonjol aktivitas kegiatan sehingga peranan dalam perolehan pendapatan tidak diperhatikan. Sebaliknya dalam rangka otonomi daerah, pariwisata banyak diandalkan sebagai unsur utama dalam PAD. Pajak dalam pariwisata bisa dalam bentuk :

- Pajak atas produk pariwisata
- Pajak dibebankan kepada konsumen yang bertindak sebagai wisatawan
- Pajak dibebankan kepada pemakai jasa pariwisata.

c. Pengeluaran Pemerintah dalam Pariwisata

Dari satu sisi pemerintah memperoleh pendapatan dari pariwisata, tetapi disisi lain pemerintah banyak mengeluarkan untuk pariwisata. Tiga pengeluaran besar pemerintah bagi pariwisata adalah :

1. Investasi dan pemeliharaan infrastruktur.
2. Fasilitas pengembangan pariwisata.
3. Pemasaran pariwisata

Investasi infrastruktur pada umumnya disiapkan pemerintah bagi kepentingan ekonomi seluruh sektor tidak hanya sektor pariwisata saja. Hanya bagian kecil dalam aktivitas pariwisata infrastrukturnya dibangun oleh sektor pariwisata. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mendukung sepenuhnya pengembangan pariwisata, karena melihat akan tumbuhnya pendapatan dari kegiatan pariwisata yang terwujud dari adanya pengembangan tersebut. Untuk ini pemerintah akan memberi bantuan pengeluaran bagi pengembangan pariwisata tersebut. Pengeluaran pemerintah dalam pengembangan pariwisata :

a. Pengeluaran langsung :

1. Subsidi / bantuan.

2. Partisipasi pemerintah dalam menyeimbangkan pembangunan.

3. Bunga Bank.

4. Bantuan bagi penelitian.

5. Bantuan bagi pendidikan dan pelatihan.

b. Reduksi dari reabilitas :

1. Reduksi pajak.

2. Bebas – pajak bagi barang / jasa tertentu.

3. Jaminan / Garansi.

4. Jaminan atas pinjaman komersial.

5. Jaminan ijin atas pekerja asing

Pengeluaran bagi pemasaran pariwisata yang dikerjakan pemerintah, antara lain untuk :

a) Riset dan kegiatan pemasaran

b) Public Relation

c) Iklan dan promosi lainnya

d) Komunikasi dan distribusinya

e) pengembangan pokok

f) Pengembangan produk

c. Pengawasan ekonomi dalam pariwisata.

Pemerintah turut campur dalam sektor pariwisata untuk tujuan perlindungan terhadap konsumen dengan membuat peraturan (memperbaiki peraturan lama / melakukan deregulasi) menyangkut :

1. Peraturan perlindungan terhadap konsumen.

2. Peraturan tentang keteraturan pemasaran.

Peraturan tersebut diatas mengemukakan jaminan atas :

a) Pemasok barang / jasa

b) Kuantitas barang / jasa serta uang yang diperdagangkan

c) Harga yang diciptakan

d) Kondisi barang / jasa yang diperdagangkan

e) Pembayaran (perlindungan atas pembayaran dimuka)

f) Lisensi usaha berfungsi sebagai perlindungan konsumen

g) Klasifikasi fasilitas akomodasi

h) Pengaturan harga atas pasokan produk.

Deregulasi dalam pariwisata ini memberikan dampak yang bermanfaat bagi konsumen dalam hal :

1. Penurunan tarif transportasi (udara) dengan penurunan biaya promosi, membuat konsumen lebih bergairah mengadakan perjalanan.

2. Integrasi antar perusahaan perjalanan atau integrasi antar perusahaan perjalanan dengan perusahaan komponen paket wisata lainnya akan menimbulkan suatu produk yang bersaing dengan produk paket wisata biasa.

3. Peraturan subsidi silang antar rute penerbangan dengan rute penerbangan yang tidak menguntungkan akan menyebabkan keberlangsungan operasi penerbangan bagi kedua rute tersebut.

Pemerintah harus berupaya mengimplementasikan kebijakan untuk menjaga pelestarian terhadap sumber daya yang tidak dapat diperbaharui ke sumber daya alam yang dapat diperbaharui dimasa mendatang. Kebijakan sektor publik tersebut didasarkan kepada kesadaran bahwa jika pengembangan pariwisata yang dilakukan hanya mengendalikan potensi sumber daya yang tidak dapat diperbaharui, tanpa mengendalikan sumber daya lainnya yang dapat diperbaharui, kemungkinan besar pengembangan pariwisata tidak dapat bersaing dengan daerah lainnya, oleh karena peranan pemerintah dalam upaya memperbaharui sumber daya harus merupakan kebijakan dan program yang dapat dilaksanakan dalam reklamasi dan rehabilitasi. Sumber daya alam meliputi, Gumelar S. Sastrayuda (2010 : 89).

a. Melakukan penelitian terhadap sumber daya yang perlu direhabilitasi dan reklamasi yang

dapat memberikan dukungan terhadap pengembangan pariwisata baru yang tidak kalah besarnya dengan pariwisata yang sudah ada bersama masyarakat.

- b. Mengembangkan partisipasi masyarakat secara berkesinambungan, melalui pengembangan ekonomi kerakyatan dalam bentuk mengelola seluruh potensi ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak dengan menerapkan prinsip atau asas ekonomi kerakyatan. Pemerintah memberikan hak dan kesempatan kepada masyarakat luas untuk memiliki akses ekonomi secara profesional dan memperluas usaha ekonomi masyarakat secara kemitraan dengan prinsip kemitraan, sebagai berikut:
 - Saling pengertian ini dikembangkan dengan cara peningkatan pemahaman yang sama mengenai lingkungan yang sama mengenai lingkungan, permasalahan lingkungan serta peranan masing-masing komponen.
 - Kesepakatan bersama, kesepakatan merupakan awal dari satu kerjasama antara pihak-pihak yang bersangkutan.
 - Tindakan bersama adalah tekad dan komitmen untuk mengembangkan lingkungan.
- c. Tindakan bersama (collective action) tindakan bersama ialah tekad bersama-sama untuk mengembangkan kepedulian lingkungan.

Disamping itu pemerintah berupaya mengembangkan tata pemerintahan yang baik (good governance), bertujuan untuk mendekatkan pemerintah dengan masyarakat terutama masyarakat di sekitar lokasi pariwisata, dengan mengedepankan peran pemerintah sebagai fasilitator dan regulator melalui :

1. Penciptaan iklim yang kondusif bagi peningkatan akses dan partisipasi masyarakat.
2. Peningkatan aset dan kapabilitas masyarakat, dan

3. Perlindungan masyarakat dari praktek dan kekuatan yang memiskinkan dan meminggirkan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, ditempuh upaya - upaya peningkatan mutu pelayanan publik melalui peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur, peningkatan akuntabilitas publik, penyegaran pelayanan masyarakat berdasarkan pelayanan minimum serta akuntabilitas prinsip - prinsip pemerintahan yang baik lainnya. Disamping pelaksanaan pembangunan memerlukan sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi, pembangunan yang dilaksanakan secara baik dimana pemerintah melaksanakan fungsinya dengan baik sebagai regulator dan fasilitator dapat membentuk dan menciptakan iklim yang kondusif bagi peningkatan akses dan partisipasi masyarakat. Pemerintah sebagai pembuat dan pengelola kebijakan publik, harus mampu menjembatani hubungan kemitraan antara organisasi-organisasi masyarakat sipil dengan sektor bisnis.

- a) Masyarakat harus melakukan pengawasan atas perkembangan kegiatan penyediaan prasarana dasar yang sedang dibangun untuk itu mereka sering membutuhkan bantuan teknik untuk mengambil keputusan dan perlu diberikan informasi yang utuh dan berbagai bimbingan akan pentingnya pengembangan pariwisata bagi masyarakat dengan berbagai keuntungan dan kerugiannya bagi masyarakat.
- b) Mengajak organisasi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan dengan dibangunnya kawasan pariwisata melalui aktivitas ekonomi seperti koperasi, pengembangan UKM dalam berbagai kegiatan usaha kerajinan, makanan, minuman, perdagangan, pertanian dan lain-

lain, sehingga mereka akan banyak mengambil manfaat dari pengembangan infrastruktur.

- c) Masyarakat harus lebih dibimbing secara berkesinambungan terhadap berbagai keuntungan yang dinikmati masyarakat setempat, baik secara perorangan maupun kelompok. Pembagian keuntungan memainkan peran penting, untuk mencapai sasaran itu perlu dibahas peran, tanggung jawab dan hak mereka secara jelas. Sistem “Share Holder” atas modal masyarakat seperti lahan/tanah terkena pengembangan prasarana dasar, merupakan satu upaya yang ditawarkan kepada masyarakat untuk mencegah hilangnya uang masyarakat yang diperoleh dari penjualan lahan atau tanah yang dibeli pengembang, dengan belanja yang bersifat konsumtif. Untuk mengikutsertakan modal masyarakat atas penjualan tanah/lahan mereka perlu dibuat satu aturan main yang jelas, transparan, tepercaya dan memiliki jangkauan keuntungan bagi penanaman modal dimasa mendatang, sehingga pertumbuhan nilai modal dapat menjadi pendorong bagi kepemilikan harta dan benda yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat.
- d) Membentuk kelompok pemangku kepentingan lokal yang akan intensif dalam kegiatan pembangunan prasarana dasar, pembentukan ini dapat melibatkan individu maupun institusi yang dapat berperan aktif dalam menyuarakan berbagai kepentingan masyarakat pada tatanan pengelola kegiatan dan pengambilan keputusan.
- e) Memberikan wawasan yang seluas-luasnya terhadap manfaat keuntungan dengan kegiatan pengembangan kawasan pariwisata dengan kegiatan konservasi. Baik

peningkatan pendapatan maupun perluasan kesempatan kerja yang dapat diperoleh masyarakat. Infrastruktur yang meliputi jalan, jembatan, listrik, telekomunikasi, air bersih merupakan infrastruktur dasar yang keberadaannya menjadi keharusan untuk dibangun baik di pariwisata maupun pada jalur yang menuju ke lokasi pariwisata, terutama jalan dan jembatan yang memungkinkan wisatawan dengan mudah mencapai pariwisata. Hal tersebut penting diperhatikan karena pada umumnya lokasi pariwisata berada pada posisi yang agak sulit dijangkau oleh kendaraan roda empat seperti bus, minibus. Untuk pengembangan infrastruktur membutuhkan tingkat kerjasama yang tinggi diantara instansi pemerintah atau BUMN pengelola kegiatan seperti listrik, telepon, air bersih dan dalam hal penyediaan sangat dibutuhkan peran aktif instansi-instansi melalui sistem kemitraan dimana peran masyarakat setempat menjadi bagian penting dan penentu untuk terjaminnya penyediaan infrastruktur di wilayah/daerah pengembangan pariwisata. Banyak permasalahan yang muncul manakala pengembang/pengelola pariwisata membangun infrastruktur dasar, seperti ketersediaan lahan yang melibatkan tanah/lahan seringkali masyarakat atau pemerintah yang harus memperoleh legalitas untuk pemanfaatannya.

- f) Memberikan informasi secara terbuka terhadap dampak negatif yang dapat terjadi dengan berkembangnya kawasan pariwisata baik dari sikap wisatawan, kehadiran wisatawan yang akan mengganggu ketenangan, pola transportasi, efek perubahan pola hidup masyarakat, dan efek

- efek sosial lainnya yang mungkin berkembangnya kawasan pariwisata di satu wilayah/daerah.

Menurut **Menurut Astra M. Ligow, SH, M.Si**, bahwa keterlibatan masyarakat yang diharapkan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan industri pariwisata kota bitung adalah:

“Masyarakat mengsucceskan program pemerintah Kota Bitung yang ingin kotanya mengalami pembangunan menjadi lebih maju, dan Masyarakat membantu investor dalam kemudahan pembangunan”.

Astra M. Ligow, juga menyampaikan mengenai langkah – langkah yang diperlukan agar masyarakat lebih berperan aktif dalam melaksanakan pembangunan industri pariwisata, yaitu;

“Adanya sosialisasi dari pihak – pihak yang terkait kepada masyarakat, dan Masyarakat diberi kesempatan untuk ikut dalam pembangunan industri pariwisata”.

Prasarana yang digunakan untuk menentukan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengembangan prasarana dasar ialah, semua lapisan masyarakat, merasakan manfaat atas penyediaan prasarana dasar yang dibangun di daerahnya. Prasarana merupakan indikator yang mampu meningkatkan derajat ekonomi masyarakat, dengan terlihatnya kemampuan daya beli masyarakat dan kemampuan masyarakat untuk memelihara, menjaga ketersediaan prasarana dasar sebagai modal utama bagi peningkatan kepercayaan kepada pemerintah, pengusaha/ pengembang kawasan pariwisata dan kebanggaan/prestise masyarakat terhadap daerah/wilayahnya.

Menurut **Menurut Kevin Kambey, S.Sos**, bahwa langkah – langkah yang diperlukan agar masyarakat lebih berperan aktif adalah;

“sosialisasi tentang pentingnya pariwisata terhadap masyarakat, dan pelatihan seperti pembelajaran bahasa asing”.

Kevin juga menambahkan bahwa,

“Masyarakat harus aktif membantu program – program yang sudah diterapkan pemerintah terutama yang menyangkut tentang pariwisata”

KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

Peran dari Pemerintah atau dinas pariwisata berawal dari perencanaan (*planning*) daerah atau kawasan pariwisata, pembangunan (*development*), fasilitas utama dan pendukung pariwisata, pengeluaran kebijakan (*policy*) pariwisata, dan pembuatan dan penegakan peraturan (*regulation*).

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan antara lain; Peran dari dinas pariwisata sangat penting karena pembangunan industri pariwisata sangat menunjang perekonomian kota bitung. Dan untuk menarik kunjungan wisatawan dan para infestor yang bergerak dibidang pariwisata. Peran dinas pariwisata sangat berpengaruh atas pembangunan industri pariwisata yang ada di Kota Bitung. Oleh karena tugas pokok dan fungsi melekat di dinas pariwisata. Peran dinas pariwisata sangat penting karena dinas pariwisata memberikan rekomendasi dan masukan untuk pengawasan pembangunan industri pariwisata. Peran Dinas Pariwisata sampai sejauh ini Dispar (Dinas Pariwisata) memiliki peran yang belum terlalu terlibat jauh karena pengurusan ijin / rekomendasi usaha indsutri pariwisata bersifat 1 (satu) pintu diperijinan. Dispar (dinas pariwisata) hanya memiliki wewenang untuk mengatasi / mengevaluasi industri pariwisata yang telah ada.

b. Saran

Kurang berhasilnya pembangunan pariwisata di Kota Bitung, diakibatkan oleh beberapa faktor

yaitu antara lain; kurangnya sosialisai atau membangun kesadaran terhadap masyarakat tentang atau mengenai pentingnya pariwisata dalam perekonomian masyarakat. Sehingga masyarakat lebih cenderung tidak aktif untuk berperan dalam pembangunan pariwisata.

Untuk itu perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pembangunan pariwisata. Dalam melaksanakan sosialisasi perlu untuk dilakukan beberapa kali, guna untuk masyarakat lebih memahami akan arti pembangunan pariwisata. Masyarakat memiliki peran sentral, sehingga keberhasilan suatu pembangunan itu karena keterlibatan dari pada seluruh masyarakat.

Seharusnya Pemerintah lebih aktif lagi dalam melaksanakan pembangunan pariwisata, baik itu dalam hal mempromosikan objek – objek wisata ke tingkat lokal dan juga ke tingkat interlokal, agar supaya lebih banyak dikenal oleh turis atau masyarakat manca Negara tentang pariwisata yang ada di Kota Bitung.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin, dan H. Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Abdurrahman. 1979. *Aneka Masalah Hukum Dalam Pembangunan Di Indonesia*. Alumni. Bandung.
- Burkart, A. J. dan Medlik, S. 1981. *Tourism: Past, Present and Future*. London:
- Budi Santoso dkk, *Strategi Pengembangan Sektor Pariwisata*, Penerbit YPAPI, Yogyakarta.
- Cohen, Erik. 1974. *Who Is A Tourist A Conceptual Clarification*. The Sociological Review, 22. The Hebrew University.
- Gumelar S. Sastrayuda. 2010. *Strategi Pengembangan dan pengelolaan Resort And Leisure*.
- Hari Sabarno, 2007. *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Sinar Grafika, Jakarata.
- Iwan Nugroho, 2011. *Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Moleong, L.J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyana W. Kusumah. 1986. *Perspektif, Teori, dan Kebijakan Hukum*. CV. Rajawali. Jakarta.
- Pendit, Nyoman. 2002. *Ilmu Pariwisata : Sebuah Pengantar Perdana*. Jakarta : PT Pradnya Paramiata.
- Pitana, I Gede. 2005. *Sosiologi Pariwisata*. Yogyakarta : ANDI
- Samsuridjal, 2006. *Peluang di Bidang Pariwisata*, PT Mutiara Sumber Widya, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2004. *Metodologi penelitian*. Jakarta. PT.Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 2009. *Pokok-pokok Sosiologi*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiono. 2009. *Metodologi Dan Penelitian Administrasi*, Bandung, Alfabeta.
- Suriansyah murhani. 2008. *Aspek Hukum Pengawasan Pemerintah Daerah*. Laksbang Mediatama. Jakarta.
- Sentosa Sembiring. 2009. *Pemerintahan Daerah*. Nuansa Aulia. Bandung.
- Sarman, dan Mohammad Taufik Makarao. 2011. *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Subadra, I Nengah. 2006. *Ekowisata Hutan Mangrove dalam Pembangunan Pariwisata*.

Wahab,S. 2008. “*Manajemen Kepariwisataaan*”.
Penerbit PT. Pradnya Paramita. Jakarta
Wigyo Adiyoso, 2009. *Menggugat Perencanaan
Partisipatif Dalam Pemberdayaan*

Masyarakat, Putra Media Nusantara,
Surabaya.